

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (RLPPD) KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2020**

Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 merupakan amanat Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 23, bahwa Kepala Daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini dimaksudkan untuk menginformasikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama Tahun 2020 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan dan saran guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun mendatang.

Arah kebijakan yang dilaksanakan tahun 2020 mengacu kepada visi yang tertuang dalam rencana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020.

“Terwujudnya Pasaman Barat yang Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Bermartabat Dan Berwawasan Lingkungan”

Bertolak dari visi diatas, maka misi dan / atau arah yang dilaksanakan adalah :

1. Menjadikan Masyarakat Beriman dan Bertakwa Melalui Pengamalan Ajaran Agama, Pemeliharaan Nilai-nilai Luhur
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan yang Berwawasan Kependudukan (Population Responsive dan Gender Responsive)
3. Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Daya Saing Lokal, Regional dan Global
4. Menanggulangi Kemiskinan melalui Penyediaan Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
5. Mewujudkan Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel
6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang berkeadilan Serta Mengelola Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang secara berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Dalam sejarah pembentukan, Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 7 Kecamatan, Kecamatan Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Pasaman, Kinali dan Talamau. Namun, berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2003 terjadi penambahan 4 kecamatan baru, yaitu: Kecamatan Koto Balingka, Sungai Aur, Sasak Ranah Pasisie, dan Luhak Nan Duo. Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah yang dilalui garis khatulistiwa terdiri dari 11 Kecamatan, 19 nagari dan 216 jorong. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Pasaman dengan luas 508,93 Km² (13,09%). Dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie merupakan wilayah kecamatan terkecil dengan luasan 123,71 Km² (3,18%).

Indikator Makro merupakan indikator yang sering dipakai untuk menilai suatu Keberhasilan Pembangunan Suatu Daerah, dalam meningkatkan Kesejahteraan Rakyat adalah TenagaKerja, Kesehatan, dan Pendidikan.

Pada Tahun 2020 penduduk Kabupaten Pasaman Barat tercatat sebanyak 443.722 jiwa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 431.575 jiwa. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2020 mengalami pertambahan penduduk sebanyak 12.147 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,19%. Dengan komposisi dengan komposisi 224.517 (51 %) laki-laki dan 219.205 (49 %) perempuan. Kecamatan Pasaman sebagai ibukota kabupaten merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah mencapai 81.748 jiwa, sedangkan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu 15.200 jiwa. Namun, jika dibandingkan dengan luas wilayah, penduduk terpadat berada di Kecamatan Luhak Nan Duo dengan kepadatan penduduk 260,62 jiwa/Km², sebaliknya Kecamatan Gunung Tuleh merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 47,91 jiwa/Km².

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman Barat mencapai lebih kurang 31,64 ribu jiwa dengan angka kemiskinan sekitar 7,04%, sedangkan tahun 2019 sebanyak 31,53 ribu jiwa dengan persentase sebesar 7,14%. Secara persentase mengalami penurunan, namun masih berada di atas rata-rata provinsi. Untuk itu, upaya pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan melaksanakan pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan perumahan/pemukiman yang layak.

Derajat kesehatan Masyarakat dapat digunakan sebagai salah satu indikator kualitas SDM yang ada, dengan Kesehatan yang memadai akan dapat mempercepat laju pertumbuhan Pembangunan. Dari segi Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki sarana Kesehatan berupa 20 unit Puskesmas dengan 40 unit Puskesmas Pembantu, 1 Unit RSUD, dan 1 unit Rumah Sakit Swasta. Dan Tahun 2018 telah dibangun 1 RS. Pratama Di Ujung Gading . Untuk RSUD Kabupaten Pasaman Barat telah ditanda tangani kesepakatan Pemerintah Daerah dengan DPRD melanjutkan pembangun multiyer sampai tahun 2021 dengan nilai ± 135 milyar rupiah.

Untuk pembangunan pendidikan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan terus melakukan pembenahan terutama dalam pembangunan sarana pendidikan. Untuk tahun 2020, perbaikan sarana melalui DAK Fisik dan DAK non fisik berupa Tunjangan Sertifikasi dan BOP Paud Swasta.

Berikut Capaian Indikator Kinerja Makro pada Tahun 2020 dan Tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,21	68,49	0,41
2	Angka Kemiskinan	7,14	7,04	-1,4
3	Angka Pengangguran	4,64	4,69	1,07
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,45	-1,34	-130,1
5	Pendapatan Per kapita	34.686	35.318	1,82

Sebagai indikator kinerja makro yang digunakan dalam mengukur keberhasilan tersebut adalah indikator kinerja bidang ekonomi dan bidang kesejahteraan rakyat. Bidang ekonomi sebagai indikator yang paling sering dipergunakan untuk merepresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berbicara tentang laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu 2019, berdasarkan angka sementara dari BPS perekonomian Pasaman Barat mengalami penurunan 5,79 % dari 4,45% tahun 2019 menjadi -1,34% tahun 2020. Penurunan ini merupakan penurunan skala Nasional dikarenakan Wabah Covid-19. Untuk PDRB per kapita Kabupaten Pasaman Barat atas dasar harga

berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 mengalami trend kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercapat sebesar 28.547 ribu rupiah. Secara nominal besarnya mengalami kenaikan hingga tahun 2019 yang mencapai 34.709 ribu rupiah. Adapun pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar 2,5 persen. Penyumbang terbesar perekonomian Kabupaten Pasaman Barat tahun adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 40,97%.

Dalam mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel, Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 4 Tahun berturut-turut dari Tahun 2016-2019.

Guna mendukung pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berusaha mengelola keuangan daerah sebaik-baiknya sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya perhitungan APBD ini, akan dapat diketahui secara pasti kebijaksanaan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, terutama dalam mengelola Keuangan Daerah selama tahun 2020 yang lalu. Dan lebih dari itu akan diketahui pula, sejauh mana Pemerintah Daerah menggunakan dan memanfaatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Perhitungan Keuangan APBD 2020, Total Pendapatan Daerah untuk tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 1.099.445.139.466,82 dari target sebesar Rp1.157.576.142.808,64 atau 94,98%. Dimana angka ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain Lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang dapat direalisasikan sampai akhir Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp. 108.857.281.190,82 Dari target sebesar Rp.112.846.255.188,64 atau 96,47%. Adapun komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah.

Pada tahun 2020 penerimaan dari pajak daerah ditargetkan sebesar Rp.23.944.575.290,64 dan dapat terealisasi sebesar Rp.19.462.573.774,59 atau 81,28% dari target. Adapun data secara lebih rinci tentang penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp. 100.000.000 dapat direalisasi sebesar Rp. 54.707.500 atau 54,71%.
2. Pajak Restoran/rumah makan ditargetkan sebesar Rp. 1.000.000.000 dapat direalisasi sebesar Rp. 848.234.742 atau 84,82%.

3. Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp. 0 dapat direalisasi sebesar Rp. 0.
4. Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp. 600.000.000 dapat direalisasi sebesar Rp. 358.256.500 atau 59,71%.
5. Pajak Penerangan Jalan ditargetkan sebesar Rp. 15.850.000.000 dapat direalisasi sebesar Rp. 13.885.006.221 atau 87,6%.
6. Pajak Air Tanah ditargetkan Rp. 200.000.000 dapat direalisasi sebesar Rp. 289.154.046 atau 144,6%
7. Pajak Sarang Burung Walet ditargetkan sebesar Rp. 0 dapat direalisasi sebesar Rp.0 atau 0%
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp 1.000.000.000 dapat direalisasi sebesar Rp. 479.045.547,59 atau 47,9%.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditargetkan sebesar Rp. 353.955.860 dapat direalisasi sebesar Rp. 698.915.370 atau 197,5%
10. Pajak BPHTB ditargetkan sebesar Rp. 4.840.619.430,64 dapat direalisasi sebesar Rp. 2.849.253.848 atau 58,86%.

Pada Tahun Anggaran 2020 retribusi daerah Kabupaten Pasaman Barat ditargetkan sebesar Rp. 4.283.280.434 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 3.384.931.489,42 atau direalisasi sebesar 79,03%. Adapun data terperinci tentang penerimaan retribusi daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan ditargetkan sebesar Rp 0. dapat direalisasi sebesar Rp. 0 atau 0%.
2. Retribusi persampahan/kebersihan ditargetkan sebesar Rp 150.000.000 direalisasi sebesar Rp. 107.500.000 atau 71,67%.
3. Retribusi Parkir Dijalan Umum ditargetkan sebesar Rp. 5.065.000 dengan realisasi Rp. 1.400.000 atau 27,64%
4. Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp. 37.834.579 dapat direalisasi sebesar Rp. 9.600.000 atau 25,37%.
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor–Mobil penumpang-mini bus ditargetkan Rp.799.960.000 dapat direalisasi sebesar Rp. 221.723.000 atau 27,72%
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditargetkan sebesar Rp. 73.889.719 dapat direalisasi sebesar Rp. 39.890.000 atau 53,99%.
7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, ditargetkan sebesar Rp. 0 dapat direalisasi sebesar Rp 17.547.000

8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditargetkan sebesar Rp.613.715.096 dengan realisasi Rp. 278.050.000 atau 45,31%
9. Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.232.816.040 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.080.712.250 atau sebesar 87,66%
10. Retribusi Terminal ditargetkan sebesar Rp. 10.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.506.000 atau 85,06%.
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp. 10.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp.4.000.000. atau 40%.
12. Retribusi Rumah Potong Hewan ditargetkan sebesar Rp. 73.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 51.000.000 atau 69,86%.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditargetkan sebesar Rp. 1.277.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.565.003.239,42 atau 122,6%.

Pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang di pisahkan Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 7.711.662.101, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. Rp. 7.711.662.101 atau direalisasikan sebesar 100%. Adapun data terperinci tentang pendapatan daerah dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bagian Laba atas Pernyataan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD-LRA ditargetkan sebesar Rp. 7.711.662.101 dapat terealisasi sebesar Rp. 7.711.662.101 atau 100%.

Lain-lain PAD Yang Sah

Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 76.906.737.364 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 78.298.113.825,81 atau direalisasikan sebesar 73,9%. Target dan realisasi sumber Lain-Lain pendapatan yang sah tersebut adalah :

1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang tidak Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 1.327.513.370 dapat terealisasi sebesar Rp.1.191.778.100 atau 89,78%.
2. Penerimaan Jasa Giro ditargetkan sebesar Rp. 1.925.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.422.759.725 atau 125,9%.
3. Pendapatan Bunga Deposito ditargetkan sebesar Rp.3.500.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.404.270.781 atau 154,4%.
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ditargetkan sebesar Rp. 0 dengan realisasi sebesar Rp. 29.923.750
5. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan ditargetkan sebesar Rp. 0 dapat direalisasikan sebesar Rp.66.191.745

6. Pendapatan Denda Pajak ditargetkan sebesar Rp. 0 dapat direalisasikan Rp.43.956.674
7. Pendapatan Hasil Eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan ditargetkan sebesar Rp. 0 dapat direalisasikan Rp. 319.586.506.
8. Pendapatan dari Pengembalian ditargetkan sebesar Rp. 3.650.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.851.269.601,65 atau 105,5%
9. Pendapatan BLUD ditargetkan sebesar Rp. 66.484.223.994 dapat direalisasikan sebesar Rp. 64.951.381.460,75 atau 65,42%.
10. Lain-lain Pendapatan Sah Lainnya ditargetkan Rp.0 direalisasikan Rp 13.245.482,41
11. Hasil dari pengelolaan Dana bergulir ditargetkan sebesar Rp. 20.000.000 dapat direalisasikan Rp. 3.750.000 atau 18,75%
12. Pendapatan dari Dana Bos SD dan SMP ditargetkan sebesar Rp. 0 dapat direalisasikan sebesar Rp. 0 atau 0%

Pada tahun 2020 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.969.044.406.620 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 927.390.973.926 atau direalisasikan sebesar 95,7%. Target dan realisasi pendapatan transfer tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Dana bagi hasil pajak ditargetkan sebesar Rp. 29.029.400.028 dapat direalisasikan sebesar Rp. 15.201.333.648 atau 52,37%.
2. Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) ditargetkan sebesar Rp. 2.595.700.941 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.702.480.789 atau 65,59%.
3. Dana alokasi umum ditargetkan sebesar Rp. 606.699.346.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 598.772.766.000 atau 98,69%.
4. Dana alokasi khusus ditargetkan sebesar Rp. 77.665.491.460 dapat direalisasikan sebesar Rp. 66.892.782.826 atau 86,13%
5. Dana alokasi khusus afirmasi ditargetkan sebesar Rp. 4.952.775.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.950.000.000 atau 39,37%
6. Dana alokasi khusus non fisik ditargetkan sebesar Rp.116.099.158.000 dapat direalisasikan sebesar Rp.116.495.348.000 atau 100,3%
7. Dana alokasi khusus penugasan ditargetkan sebesar Rp. 25.554.492.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 23.434.406.289 atau 91,7%
8. Dana penyesuaian ditargetkan sebesar Rp. 56.566.205.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 69.803.966.000 atau 97,03%

9. Pendapatan bagi hasil pajak ditargetkan sebesar Rp. 49.281.838.191 dapat teralisasi Rp. 47.457.631.995 atau 96,3%

10. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah ditargetkan sebesar Rp. 600.000.000 dapat teralisasi Rp. 600.000.000 atau 100%

Pada tahun 2020 lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp. 75.685.481.000 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 63.196.884.350 atau 3.495 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah ditargetkan sebesar Rp. 14.850.781.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.522.474.350 atau 16,99%
2. Pendapatan Hibah dana BOS SD ditargetkan sebesar Rp. 45.253.200.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 45.111.720.000 atau 0%.
3. Pendapatan Hibah dana BOS SMP ditargetkan sebesar Rp. 15.458.400.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 15.439.590.000 atau 0%.
4. Pendapatan Lainnya ditargetkan sebesar Rp. 123.100.000 dapat terealisasi Rp. 123.100.000 atau 100%

Pendapatan Daerah

Total Pendapatan Daerah untuk tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.1.157.576.142.808,64 dari target sebesar Rp.1.099.455.1339.466,82 atau 87,89%.

Pada tahun 2020 Belanja daerah Kabupaten Pasaman Barat yang terealisasi adalah sebesar Rp.1.004.961.143.062,63 sedangkan pada tahun 2019 total belanja daerah yang terealisasi adalah sebesar Rp.1.076.131.059.745,45 Hal ini berarti bahwa belanja daerah Kabupaten Pasaman Barat mengalami penurunan sebesar Rp. 71,169,916,682.82 atau 6,61% dari tahun 2019. Belanja daerah Tahun Anggaran 2020 tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp. 863.519.626.477,73 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 800.836.807.125,78 atau 92,74% dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, dianggarkan sebesar Rp. 501.204.910.582 direalisasi sebesar Rp 474,867,210,732 atau 94,75%
2. Belanja Barang dan Jasa, dianggarkan sebesar Rp. 307.184.170.065,73 direalisasi sebesar Rp. 271.508.557.923,78 atau 67,06%

3. Belanja Hibah, dianggarkan sebesar Rp. 55.130.545.830 direalisir sebesar Rp. 54.461.038.470 atau 98,79%
4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota , dianggarkan Rp 0 direalisir sebesar Rp 0

Belanja modal dianggarkan Rp. 209.459.641.214,60 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 182.357.589.116,85 atau 78,91% dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 59.930.945.327 direalisir sebesar Rp. 54.961.676.366 atau 78,4%
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp 96.461.124.308,15 direalisir sebesar Rp. 85.292.424.789,22 atau 88,24%
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp. 41.076.771.412,45 direalisir sebesar Rp. 31.449.443.736,63 atau 76,56%
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 8.598.860.185 direalisir sebesar Rp. 8.445.421.305 atau 16,04%
5. Belanja Modal BLUD dianggarkan sebesar Rp. 3.151.939.982 direalisir sebesar Rp 1.968.693.170 atau 3,50%
6. Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 240.000.000 direalisir sebesar Rp. 239.929.750 atau 99,97%

Belanja tak terduga dianggarkan Rp. 30.822.068.963,38 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 21.766.746.820 atau 70,7% dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tak Terduga, dianggarkan Rp. 30.822.068.963,38 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 21.766.746.820 atau 70,7%

Transfer dianggarkan Rp. 116.038.753.542,36 dan dapat direalisasikan Rp113.863.826.525 atau 98,12%. Transfer daerah terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.

Transfer bagi hasil pendapatan dianggarkan Rp.2.822.785.572,46 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.331.889.923 atau 82,61% dengan rincian sebagai berikut:

1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2.394.457.529,06 direalisir sebesar Rp. 2.010.328.559 atau 44,93%
2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya dianggarkan sebesar Rp.428.328.043,40 direalisir sebesar Rp. 321.561.364 atau 83,96%.

Transfer bantuan keuangan dianggarkan Rp113.215.967.969,90 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 111.531.936.602 atau 98,51% dengan rincian sebagai berikut:

1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dianggarkan sebesar Rp. 112.152.265.696,90 direalisasikan sebesar Rp. 110.468.234.329 atau 98,5%
2. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. Rp1.063.702.273 direalisasikan sebesar Rp. 1.063.702.273 atau 100%.

Untuk Pembiayaan Netto Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 62.263.947.389,43. Dana tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan (defisit) pendapatan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 64.856.326.689,43

Adapun realisasi pembiayaan Kabupaten Pasaman Barat sampai akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018 yang dianggarkan Rp.76.763.947.389,43 terealisasi sebesar Rp.73.220.306.889,43 atau 86,97%.

Pengeluaran pembiayaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 terdiri dari : Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, dianggarkan sebesar Rp. 14.500.000.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.363.980.200 atau terealisasi 0% dari anggaran.

Demikian RLPPD ini disampaikan pada Masyarakat luas. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran, dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat disampaikan melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Jl.Soekarno-Hatta No.2 Simpang Empat Kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, Maret 2021

